

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Komunikasi menjadi aspek mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan di berbagai level, termasuk ditingkat Lembang atau Desa adat di wilayah Toraja. Era demokratisasi dan keterbukaan informasi telah menuntut semua unit Pemerintahan, termasuk di tingkat Desa, untuk membangun sistem komunikasi yang bersifat dialogis dan partisipatif, guna menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*)¹. Masyarakat Toraja secara khusus memiliki struktur sosial yang kental dengan nilai-nilai adat dan hierarki sosial. Struktur ini, meskipun menjadi kekuatan budaya, dalam praktik komunikasi pemerintahan dapat menciptakan ketimpangan suara antara aparat dan masyarakat biasa. Hal ini menuntut pendekatan komunikasi yang sensitif terhadap budaya, namun tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kesetaraan dalam diskursus publik²

Namun realitas di lapangan menunjukkan bahwa masih terdapat berbagai hambatan komunikasi antara aparat Kantor Lembang dengan masyarakat di Lembang Gasing. Aparat pemerintah masih banyak

¹ Miriam Budiarjo, *DASAR-DASAR ILMU POLITIK* (Jakarta: Gramedia pustaka utama, 2009).14

² T salombe & A sumule, "Komunikasi Pemerintah Desa Dalam Masyarakat Adat," *jurnal komunikasi sosial* 8 (2021): 137–149.

memposisikan diri sebagai penyampai keputusan, bukan fasilitator dialog. Hal ini berdampak pada rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, terbatasnya pemahaman masyarakat terhadap program pembangunan, dan bahkan potensi konflik yang bersumber dari miskomunikasi.

Fenomena ini juga terlihat di Lembang Gasing, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja. Hasil observasi awal menunjukkan bahwa masyarakat seringkali tidak terlibat dalam proses musyawarah pembangunan Desa. Aspirasi mereka dianggap tidak diakomodasi secara adil, dan komunikasi antar pihak lebih sering berbentuk sosialisasi program daripada diskusi timbal balik. Padahal, dalam konteks budaya Toraja yang menjunjung tinggi nilai kebersamaan dan musyawarah, pola komunikasi yang tidak setara ini menjadi kontraproduktif terhadap Harmoni sosial. Fenomena-fenomena tersebut mengindikasikan belum optimalnya komunikasi dialogis antara aparat Lembang dengan masyarakat³

Untuk menjawab tantangan ini, diperlukan pendekatan komunikasi yang tidak hanya bersifat instrumental, tetapi juga deliberatif. Teori tindakan komunikatif Jurgen Habermas menawarkan perspektif kritis untuk menganalisis dinamika komunikasi antara aparat pemerintah dan masyarakat. Habermas menekankan pentingnya komunikasi yang bebas

³Observasi awal dilakukan pada bulan Januari 2025 di Lembang Gasing melalui pengamatan langsung dan wawancara informal dengan beberapa tokoh masyarakat.

dari dominasi (*herrschaftsfreie kommunikation*), dimana semua pihak memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam diskursus publik⁴. Dalam konteks Lembang Gasing, teori ini dapat digunakan untuk mengkritik praktik Komunikasi yang masih bersifat *top-down* dan tidak partisipatif, serta memberikan rekomendasi membangun komunikasi yang lebih demokratis dan inklusif. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengkritisi pola komunikasi yang ada sekaligus menawarkan solusi berdasarkan prinsip-prinsip komunikasi ideal menurut Habermas.

Urgensi penelitian ini semakin relevan mengingat beberapa hal. Pertama, implementasi UU Desa No 6 Tahun 2014 menuntut penguatan kapasitas komunikasi pemerintah desa/Lembang dalam membangun partisipasi masyarakat⁵. Kedua, peningkatan alokasi dana desa menuntut komunikasi yang lebih transparan dan akuntabel dalam pengelolaan pembangunan Lembang. Ketiga, dinamika sosial-politik lokal membutuhkan pendekatan komunikasi yang lebih dialogis untuk mencegah potensi konflik dalam penyelenggaraan pemerintahan Lembang

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji implementasi teori diskursus Habermas dalam konteks komunikasi pemerintahan. Penelitian Widodo menganalisis penerapan komunikasi deliberatif dalam

⁴ Jurgen Habermas, *Teori Tindakan Komunikatif* (Kreasi Wacana, 2006).23

⁵ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

musyawarah perencanaan pembangunan desa di Kabupaten Malang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik komunikasi deliberatif dapat meningkatkan partisipasi dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa⁶. Studi yang dilakukan oleh Rahman di Kabupaten Bone mengungkapkan bahwa kualitas komunikasi dialogis antara pemerintah desa dengan masyarakat berpengaruh signifikan terhadap efektivitas implementasi program pembangunan desa⁷.

Sementara itu, Putri mengkaji penerapan prinsip-prinsip komunikasi Habermasian dalam forum musyawarah desa di Yogyakarta. Penelitian tersebut menemukan bahwa masih terdapat kendala struktural dan kultural yang menghambat terwujudnya komunikasi yang ideal antara aparat desa dengan masyarakat⁸. Sejalan dengan itu, studi Anwar di Kabupaten Toraja Utara mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas komunikasi dialogis dalam penyelenggaraan pemerintahan Lembang, antara lain kapasitas SDM aparat, ketersediaan sarana komunikasi, dan budaya politik lokal⁹.

Penelitian Sahabuddin menganalisis pola komunikasi pembangunan

⁶ Widodo S, "Implementasi Komunikasi Deliberatif Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa," *komunikasi pembangunan* 16 (2018): 172–185.

⁷ A Rahman, "Pengaruh Kualitas Komunikasi Dialogis Terhadap Efektivitas Program Pembangunan Desa Di Kabupaten Bone" 8 (2019): 12.

⁸ R D Putri, "Komunikasi Habermasian Dalam Forum Musyawarah: P Studi Kasus Di Kabupaten Bantul," *Jurnal Ilmu komunikasi* 12(2) (2020): 89–104.

⁹ K Anwar K, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Komunikasi Dialogis Dalam Penyelenggaran Pemerintahan Lembang," *jurnal governance* 9(1) (2021): 67–82.

di Lembang-Lembang wilayah Toraja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih dominannya pendekatan komunikasi linear dan top-down menjadi kendala dalam membangun partisipasi masyarakat¹⁰. Studi komparatif yang dilakukan oleh Prasetyo di beberapa desa di Pulau Jawa dan Sulawesi mengungkapkan variasi implementasi komunikasi dialogis dalam tata kelola pemerintahan desa yang dipengaruhi oleh konteks sosial-budaya setempat¹¹.

Meskipun telah ada beberapa penelitian terdahulu yang mengkaji implementasi teori diskursus Habermas dalam konteks komunikasi pemerintahan desa/Lembang, penelitian ini mengambil posisi berbeda, dengan fokus pada implementasi teori diskursus Habermas dalam konteks komunikasi antara Aparat Kantor Lembang dan masyarakat di Lembang Gasing, Kabupaten Tana Toraja. Penelitian ini bertujuan untuk menggali bagaimana praktik komunikasi pemerintahan berlangsung dalam kerangka budaya Toraja, dan sejauh mana prinsip komunikasi diskursif dapat diterapkan untuk memperkuat relasi antara pemerintah dan masyarakat desa. Jika ditinjau dari penelitian terdahulu yang telah dipaparkan di atas, masih terdapat beberapa celah penelitian yang perlu diisi. Pertama, mayoritas penelitian terdahulu lebih berfokus pada aspek struktural komunikasi dan belum banyak mengeksplorasi dimensi kultural yang

¹⁰ M Sahabuddin M, "Pola Komunikasi Pembangunan Di Wilayah Lembang Toraja: Analisis Pendekatan Partisipatif," *jurnal komunikasi dan pembangunan* 20 (2022): 23–38.

¹¹ Prasetyo B, "Variasi Implementasi Komunikasi Dialogis Dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa: Studi Komparatif Di Pulau Jawa Dan Sulawesi," *jurnal politik Lokal* 5 (2023): 12–28.

mempengaruhi praktik komunikasi di tingkat Lembang. Kedua, belum ada penelitian yang secara spesifik mengkaji implementasi teori diskursus Habermas dalam konteks komunikasi pemerintahan Lembang di wilayah Toraja yang memiliki karakteristik sosial-budaya yang khas.

Signifikansi penelitian ini dapat dilihat dari beberapa aspek. Secara teoretis, penelitian ini akan berkontribusi pada pengembangan teori diskursus Habermas dalam konteks komunikasi pemerintahan lokal di Indonesia, khususnya dengan mempertimbangkan dimensi kultural masyarakat Toraja. Secara praktis, hasil penelitian dapat menjadi rujukan bagi upaya penguatan kapasitas komunikasi aparat Lembang dalam membangun partisipasi masyarakat. Secara metodologis, penelitian ini menawarkan pendekatan studi kasus yang memadukan analisis struktural dan kultural dalam mengkaji praktik komunikasi di tingkat Lembang

B. Fokus Masalah

Fokus penelitian ini secara kritis menganalisis pola komunikasi antara aparat Kantor Lembang dan masyarakat Desa Gasing melalui lensa Teori Tindakan Komunikatif Habermas, dengan fokus pada :(1) dominasi komunikasi satu arah yang mengabaikan prinsip kesetaraan partisipasi, (2) distorsi komunikasi akibat hierarki adat dan ketidakjelasan klaim kesahihan (kebenaran, kejujuran, ketetapan normative),serta (3) kolonisasi dunia-kehidupan(*lifeworld*) oleh logika birokrasi yang meminggirkan nilai-nilai

musyawarah lokal.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah penelitian ini ialah bagaimana analisis Pola Komunikasi antara aparat kantor Lembang dengan masyarakat di Desa Gasing menurut teori Tindakan komunikatif Habermas?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini ialah untuk menjelaskan bagaimana analisis Pola Komunikasi antara aparat kantor Lembang dengan masyarakat di Desa Gasing menurut teori Tindakan komunikatif Habermas

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan Kredilitas institusi dan pengetahuan bagi segenap civitas IAKN TORAJA dan berkontribusi terhadap mata kuliah Komunikasi Lintas Budaya dan Pengantar Ilmu Komunikasi.

2. Manfaat Praktis

a. Pembaca

Untuk manfaat praktis bagi pembaca dalam konteks penelitian tentang implementasi teori diskursus Habermas untuk membangun komunikasi aparat Kantor Lembang dengan masyarakat di Lembang Gasing, yaitu dapat Memberikan wawasan komprehensif tentang dinamika komunikasi antara pemerintah Lembang dengan masyarakat di wilayah Toraja

b. Bagi Masyarakat Lembang Gasing:

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis untuk memperbaiki pola Komunikasi antara aparat pemerintah dan warga, sehingga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, dan mengurangi potensi konflik akibat miskomunikasi.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang menekankan pada deskripsi dan analisis mendalam. Fokus utama penelitian ini terletak pada proses dan makna yang terkandung di dalamnya. Fakta, peristiwa, dan gejala yang muncul di lapangan diamati serta ditafsirkan secara langsung, kemudian dijadikan dasar untuk kajian dan tindak lanjut¹².

¹² Abdul Fattah, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV. Harfa Creative, 2023)3.

Penelitian ini mengadopsi metodologi kualitatif berbasis studi kasus untuk penelitian "analisis pola komunikasi aparat kantor Lembang dengan masyarakat di Desa Gasing menurut teori Tindakan komunikatif Habermas" sangat relevan karena metode ini memungkinkan peneliti mengeksplorasi secara mendalam dinamika komunikasi yang terjadi dalam konteks spesifik pemerintahan Lembang sebagai unit administrasi lokal di Toraja.

G. Sistematika Penelitian

Struktur penyusunan laporan penelitian ini dijelaskan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan berisi Latar belakang masalah, rumusan masalah, focus masalah, sasaran dan maksud penelitian, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan teori pada bab ini mencakup Konsep dasar komunikasi dan konsep Dasar teori habermas yang akan diuraikan pada tulisan ini.

Bab III metodologi penelitian pada bab ini membahas tentang metode penelitian, yang meliputi waktu dan Lokasi penelitian, jenis penelitian yang akan digunakan untuk mengumpulkan data, informasi dan analisis.

Bab IV temuan riset dan kajian analitis, bagian ini menyajikan tentang pemaparan hasil penelitian dan analisis hasil penelitian.

Bab V pada bab ini berisi kesimpulan hasil penelitian dan saran-saran